



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 - 2026

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA





SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA

NOMOR : 100.3.3/620/RO-PSJ/2023

TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 – 2026

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024–2026, dan dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya perubahan kebijakan, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun 2024-2026.
- b. bahwa untuk maksud huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
18. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
19. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi Papua Tentang Rancangan Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026.
- KESATU** : Menetapkan Rancangan Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penjabaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026.
- KETIGA** : Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua 2024 – 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua 2024 – 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
 Pada Tanggal : 16 Agustus 2023



KEPALA BIRO,
 DEBORA D. SALOSA, S.Hut., MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP 19771223 200212 2 010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan.

RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua merupakan dokumen rencana perangkat daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pengadaan barang dan jasa dalam kurun waktu tahun 2024-2026 dengan mengacu pada RPD Pemerintah Provinsi Papua sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026.

Maksud disusunnya RENSTRA Tahun 2024-2026 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan selama 3 tahun kedepan sesuai dengan arah Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Demikian rancangan RENSTRA Tahun 2024-2026 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dibuat sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Jayapura, Agustus 2023


KERALA BIRO,
DEBORA D. SALOBA, S.Hut., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19771223 200212 2 010

DAFTAR ISI

	Halaman:
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2 Telaahan Sasaran Strategis, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.....	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024-2026	47
BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS ...	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII PENUTUP.....	56

Revisi Program dan Kegiatan serta Pendanaan Baru Program dan Kegiatan Tahun 2024-2025

Tajuk	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL)	Satuan	Data Capaian pada Bulan dan Periode	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Kendali Risiko	Monev		
							Tahun 2024		2025		2026				Berkas	Rincian
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		Program Kesehatan Masyarakat	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL)	orang	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000
							100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000		
Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		Program Kesehatan Masyarakat	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL)	orang	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000
							100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000		
Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		Program Kesehatan Masyarakat	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL)	orang	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000
							100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000		
Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		Program Kesehatan Masyarakat	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL)	orang	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000
							100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000		

No	Uraian	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Cara ukur (cara ukur, alat ukur, periode)	Target Kinerja Strategis dan Operasional				Kendali Kinerja		Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	
								Tahun awal 2018	2018	2018	2018	akhir awal periode	akhir akhir periode		
1				Administrasi Umum (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
2				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
3				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
4				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
5				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
6				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
7				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
8				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
9				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
10				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
11				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
12				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
13				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
14				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
15				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
16				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
17				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
18				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
19				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		
20				Kelembagaan (MIS) dan lain-lain		orang	1	1	1	1	1	1	1		

Tahun	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Bentuk	Tipe	Tahun 2014/2015		2016		2017		Total
						Budget	Rp	Budget	Rp	Budget	Rp	
2014	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2015	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2016	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2017	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2018	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2019	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2020	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2021	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2022	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2023	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2024	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2025	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2026	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2027	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2028	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2029	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2030	01	01.1.01	Program dan Kegiatan	Program	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

